

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah suatu perkumpulan serta analisis akuntansi yang memiliki aktivitas berkesinambungan dengan usaha agar menghasilkan barang dan pelayanan publik. Organisasi sektor publik pada saat ini dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi biaya ekonomi ataupun sosial untuk suatu aktivitas. Tuntutan tersebut menjadikan keberadaan organisasi sektor publik berkembang dan dapat secara mudah dijumpai. Bastian, Indra (2010) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar edisi ketiga” telah membatasi bahwa organisasi sektor publik berkaitan dengan lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan LSM-LSM termasuk yayasan-yayasan sosial.

Organisasi sektor publik memiliki banyak aspek penting salah satunya yaitu keuangan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor publik masih mempunyai andil besar dalam suatu negara. Pengelolaan keuangan publik telah terbukti sangat berperan sebagai kunci dalam mempertahankan kontinuitas dari organisasi sektor publik. Menurut Alfiah et al. (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan adalah segala hal yang berbentuk kegiatan administratif dalam beberapa tahapan yakni perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pembukuan, pengawasan atau evaluasi, serta pertanggungjawaban dari kas masuk ataupun kas keluar dari dana instansi maupun organisasi dalam suatu periode tertentu.

Peran tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang telah mengatur segala hal berkaitan dengan penyajian laporan keuangan dalam entitas yang berorientasi nonlaba. Entitas ataupun organisasi menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah organisasi tersebut merupakan suatu organisasi berorientasi nonlaba terlepas dari bentuk badan hukum organisasi tersebut sehingga dapat menerapkan interpretasi ini. Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto,

laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

Di negara Indonesia, saat ini terdapat banyak entitas berorientasi nonlaba yang menyebar luas di penjuru nusantara. Organisasi ini bergerak atas dasar sukarela yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan (Handoyo, 2016). Entitas berorientasi nonlaba adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan pelayanan sosial yang masih memperoleh keuntungan hanya untuk menutupi biaya yang berasal dari kegiatan operasionalnya, sehingga keuntungannya disalurkan kembali pada kegiatan tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan organisasi swasta (*profit*), dimana perbedaan yang paling dasar terletak pada mekanisme organisasi dalam memperoleh sumber daya awal yang dibutuhkan serta tujuan yang selalu terpaku akan keuntungan (laba) yang diperoleh sebesar-besarnya.

Salah satu entitas berorientasi nonlaba yang dibahas pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan UU No 28 Tahun 2004 yaitu tentang yayasan. Salah satu yayasan yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan yang memiliki tujuan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan. Yayasan lembaga pendidikan merupakan lembaga yang bertujuan tidak untuk memperoleh laba atau keuntungan yang pada hakikatnya memberikan layanan jasa pendidikan kepada konsumen, yaitu anak didik, siswa, mahasiswa, santri dan masyarakat umum yang menjadi *stakeholders*, sehingga layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi para *stakeholders* yang terkait. Yayasan lembaga pendidikan memiliki kekayaan yang didapatkan dengan tidak bertentangan pada anggaran dasar dari yayasan yang sepenuhnya dilakukan oleh pengurus yayasan. Dimana pengurus yayasan lembaga pendidikan juga wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang tepat dan akurat untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang seperti donatur, *stakeholders*, masyarakat, dan lain sebagainya (Darmansyah, 2021).

Pelaporan keuangan pada entitas berorientasi nonlaba tidak lepas dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam entitas berorientasi nonlaba

sangat dibutuhkan agar kecurangan-kecurangan dapat dihindari. Akuntabilitas sendiri digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yayasan kepada pemberi dana untuk menjelaskan pengeluaran yang terkait dengan pengelolaan yayasan apakah telah digunakan secara baik ataupun tidak. Faktor pendukung dalam akuntabilitas keuangan entitas berorientasi nonlaba ditentukan oleh sumber daya manusianya yang handal, infrastruktur, maupun pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada. Faktanya pada fenomena yang terjadi secara langsung tidak sedikit entitas berorientasi nonlaba yang menjalankan organisasi ini hanya demi kepentingan pribadi atau hanya untuk keuntungan diri sendiri yang dimaksudkan dengan para petinggi entitas berorientasi nonlaba tersebut.

Menurut Douglas dan Mills (2000) menyatakan entitas berorientasi nonlaba merupakan tempat yang sangat mudah untuk melakukan kecurangan karena didasarkan dengan kepercayaan pemerintah atau donatur kepada kegiatan yang diadakan entitas berorientasi nonlaba. Hal ini serupa dengan penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Ginting et al. (2021) yang menjelaskan praktik *fraud* yang dilakukan entitas berorientasi nonlaba berupa manipulasi data baik angka maupun tulisan serta kebohongan dalam transaksi keuangan dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal dan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging.

Dari banyak kasus yang telah terungkap, konflik-konflik dalam entitas berorientasi nonlaba seringkali tidak terekspos di berbagai media. Hal itu dikarenakan konflik-konflik tersebut sering ditutupi agar citra organisasi tidak tercoreng atau dicap negatif di mata masyarakat. Konflik-konflik internal organisasi juga dianggap sebagai aib, sehingga secara sengaja konflik internal ini ditutup-tutupi. Padahal konflik-konflik internal ini menjadi salah satu faktor penghambat organisasi terutama pada entitas berorientasi nonlaba dalam mencapai tujuannya (Ardhian, 2013). Dalam entitas berorientasi nonlaba memang kerugiannya tidak sebesar organisasi komersial, tetapi kerugian terbesar yang diterima entitas berorientasi nonlaba jika tersandung kasus *fraud* adalah reputasi. Jika entitas berorientasi nonlaba mengalami kasus *fraud*, maka seluruh sumber-sumber dana entitas berorientasi nonlaba akan terputus dan pemberi dana akan

kehilangan kepercayaan kepada entitas berorientasi nonlaba tersebut (N, Aqilla 2020).

Fenomena yang terjadi secara langsung dalam pengelolaan keuangan entitas berorientasi nonlaba khususnya yayasan lembaga pendidikan menurut Nada (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Kontruksi Laporan Keuangan Lembaga Pendidikan Pada SD Putra Mandiri Di Pondok Pesantren Asy-Syifa Jember" yaitu tidak dikelolanya secara baik dan sesuai dengan pedoman yang ada. Yayasan Pendidikan Islam "Al-Furqon", Yayasan Pendidikan Islam Al-Amien, dan Yayasan Pendidikan, Dakwah dan Sosial Nurul Islam merupakan bagian dari yayasan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Jember dikarenakan objek tersebut telah sesuai dengan judul dari penelitian ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada yayasan lembaga pendidikan di Kabupaten Jember. Selain itu, yayasan lembaga pendidikan ini merupakan yayasan di Kabupaten Jember yang menjadi sorotan dikarenakan kualitas dari siswa-siswi serta biaya sekolah yang relatif cukup besar.

Hal tersebut menjadikan dasar penelitian ini untuk mengulik dan membahas terkait permasalahan pengelolaan keuangan yang ada di Indonesia, terutama dalam entitas berorientasi nonlaba yayasan lembaga pendidikan yang cukup besar di Kabupaten Jember, sudahkah menerapkan pedoman yang sesuai dan terbaru yaitu ISAK No. 35. Berdasarkan hal tersebut sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Yayasan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Jember"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang untuk penelitian ini agar pertanyaan dapat lebih terfokus dan terarah. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, maka pertanyaan penelitian yang dipresentasikan dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana pengelolaan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada yayasan lembaga pendidikan di Kabupaten Jember?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data kualitatif melalui pendekatan fenomenologi serta untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada yayasan lembaga pendidikan di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada yayasan lembaga pendidikan di Kabupaten Jember.
- b. Bagi entitas berorientasi nonlaba dapat menambah pengetahuan tingkat pelayanan yang ada untuk kepentingan publik, serta diharapkan dapat menjadi referensi ataupun bahan pertimbangan bagi entitas berorientasi nonlaba khususnya yayasan lembaga pendidikan dalam rangka mengembangkan dan memperbaiki kinerja mereka.
- c. Bagi pihak akademik untuk dapat digunakan sebagai pembelajaran teoritis berkaitan dengan pengelolaan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada yayasan lembaga pendidikan.
- d. Bagi Penelitian berikutnya dapat memberikan bukti empiris dan rujukan sumber informasi sehingga dapat dijadikan sumber referensi tambahan dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang atau pengembangan penelitian lebih lanjut.